

PROPOSAL PENELITIAN



PROBLEMATIKA SEKTOR PARIWISATA DAN PERTUMBUHUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI

DISUSUN OLEH:

Ketua: Irmanelly, SE, ME / NIDN: 1022017301
Anggota: Ardi Afrizal, SE, ME/ nidn: 1010058503

Dibiayai oleh:

Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI

2021

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : **Problematika Sektor Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi**
2. Persrta Program : Penelitian Kelompok
3. Tim Penelitian
 - A. Ketua Tim Penenelitian
 - a. Nama : Irmanelly, SE, ME
 - b. NIDN : 1022017301
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
 - B. Anggota
 - a. Nama : Ardi Afrizal, SE, ME
 - b. NIDN : 1010058503
 - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - d. Program Studi : Manajemen
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
4. Alamat Kantor/Telp/E-mail : Jl. Kapten Patimura, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124. Telp. (0741)-60825 E-mail: humas@umjambi.ac.id
5. Lokasi Kegiatan : Desa Kubu Kandang Kabupaten Batanghari
6. Rencana Kegiatan Penelitian : 3 Bulan
7. Biaya Total Penelitian : 3 Juta Rupih
 - Dana Universitas : 1.500.000,-
Muhammadiyah Jambi
 - Dana Pribadi : 1.500.000,-

Mengetahui,
Ka. Prodi Ekonomi Pembangunan

Jambi, 30 Desember 2021
Ketua Peneliti,

Ratih Rosita, SE, ME
NIDN.1011118603

Irmanelly, SE, ME
NIDK. 1022017301

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi

Prima Audia Daniel, SE, ME
NIDK.8852530017

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN	iii

BAB I. LATAR BELAKANG	1
------------------------------------	----------

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	3
---------------------------------------	----------

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	9
---	----------

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi penting. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Sektor pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan. Tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia menyebutkan bahwa usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Provinsi Jambi merupakan daerah yang giat mengembangkan potensi wilayahnya untuk tujuan wisata dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Provinsi Jambi memiliki berbagai ragam obyek dan daya tarik wisata yang terdiri atas obyek wisata alam, museum, peninggalan purbakala, pusat kesenian, pusat kerajinan. Namun obyek wisata sebanyak itu belum menjadi atraksi wisatawan.

Kata kunci; Problematika, sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakalah, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya merupakan sumber daya modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data statistik, tercatat bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai salah satu penghasil devisa negara. Pariwisata dapat menjadi industri andalan untuk daerah yang tidak memiliki sumber daya migas, hasil hutan dan industri manufaktur (Wijaya dan Mustika, 2014). Tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia menyebutkan bahwa usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Disamping itu, pengembangan kepariwisataan juga bertujuan untuk memperkenalkan alam dan kebudayaan Indonesia.

Banyak keuntungan yang didapat dari pengembangan sektor pariwisata antara lain peningkatan devisa negara, peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan daerah. Pembangunan sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini, merupakan salah satu sektor unggulan (leading sector) dalam perekonomian nasional maupun daerah senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan (Suhermansyah, 2013). Dalam melakukan pengembangan pariwisata, diperlukan berbagai pendukung untuk memperlancar jalannya kegiatan antara lain: sumber daya manusia yang berkualitas, adanya dana yang memadai, sarana dan prasarana pendukung serta kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan bidang pariwisata.

Melihat hal tersebut, maka akan sangat diharapkan dukungan dan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan sarana dan prasarana agar dapat lebih menarik minat para wisatawan yang berkunjung ke daerah Provinsi Jambi sehingga dapat menstimulasi peningkatan penerimaan daerah sektor pariwisata. Meskipun tidak ada satu sektor pun yang menjadi kunci ajaib, namun dengan memberdayakan sektor tertentu yang dianggap sebagai ciri khas suatu daerah tersebut tentunya akan memberikan cukup kontribusi kepada pendapatan daerah yang bersangkutan dan tentunya masih memerlukan dukungan dari beberapa sektor terkait (Aditama, 2013).

Provinsi Jambi merupakan daerah yang giat mengembangkan potensi wilayahnya untuk tujuan wisata dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Objek dan daya tarik wisata yang dimiliki oleh Provinsi Jambi cukup banyak dan bervariasi. Provinsi Jambi memiliki banyak aneka ragam objek dan daya tarik wisata yang terdiri dari atas objek wisata alam, museum, peninggalan purbakala, pusat kesenian, pusat kerajinan. Objek wisata sebanyak itu belum mencakup

atraksi wisata. Kepariwisataan di Provinsi Jambi berkembang cukup baik, bahkan beberapa kawasan dan obyek pariwisatanya telah terkenal hingga mancanegara. Pentingnya pengembangan pariwisata membuat Provinsi Jambi menggalakkan sektor ini untuk menggerakkan industri-industri kecil dan meraih peluang keuntungan dari sektor pariwisata.

Upaya pengelolaan obyek-obyek wisata daerah tujuan wisata di Provinsi Jambi juga telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, hal ini dapat ditunjukkan melalui perkembangan jumlah tempat pariwisata dari tahun ke tahunnya. Agar usaha pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik sesuai program dan visi yang telah dibuat maka saat ini perlu untuk menjalin kerjasama dengan daerah lain serta beberapa pemilik travel wisata dalam rangka melakukan promosi wisata. Tak jarang Pemerintah Daerah juga memberikan kesempatan kepada para investor yang mau melakukan investasi karena dalam pengembangan tempat wisata tersebut dibutuhkan biaya yang tidak dapat hanya dibebankan kepada APBD saja, selain itu perlunya menjalin kerjasama dengan praktisi bidang kepariwisataan.

Di Provinsi Jambi banyak tempat pariwisata, baik wisata alam dan rekreasi, wisata sejarah, maupun agrowisata atau wisata pertanian. Namun tidak semua arena wisata itu dikenal dengan masyarakat dan laku dijual serta mendatangkan pengunjung. Dan ini perlu diusahakan oleh Dinas Pariwisata untuk mengembangkan obyek-obyek yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sehingga judul penelitian ini yaitu **Problematika Sektor Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika sektor pariwisata di Provinsi Jambi tahun 2011-2020
2. Bagaimana perkembangan jumlah tempat pariwisata di Provinsi Jambi tahun 2011-2020?
3. Bagaimana pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2011-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Bagaimana problematika sektor pariwisata di Provinsi Jambi tahun 2011-2020
2. Untuk menganalisis perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Jambi tahun 2011-2020.
3. Untuk menganalisis pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2011-2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pariwisata

Pengertian pariwisata secara etimologi kata pariwisata berasal dari bahasa sanskerta yaitu kata “pari” yang berarti banyak; berkali-kali; berputar-putar, kata “wisata” yang berarti perjalanan;berpergian. Pariwisata dalam bahasa inggris adalah “tour”(Spillane, 2001). Menurut H. Kodyat, pariwisata atau wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh manusia diluar tempat tinggalnya untuk berbagai maksud dan tujuan, tetapi bukan untuk tinggal menetap ditempat yang dikunjungi atau disinggahi untuk melakukan pekerjaan dengan mendapat upah (Santoso, 2006). Menurut Frans Gomang, pariwisata yaitu salah satu dari industri gaya baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain didalam penerimaan wisatawan (Gromang, 2003).

2.1.2. Definisi Wisatawan

Wisatawan yaitu seorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata, jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam didaerah atau negara yang dikunjungi. Namun apabila mereka tinggal dalam waktu kurang dari 24 jam maka mereka disebut peloncong (suwantoro,2004). Menurut Spillane, wisatawan ialah pengunjung sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam dinegara yang dikunjungi dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Pesiar yaitu untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan dan olah raga.
- b. Hubungan dagang sanak keluarga, handai taulan, konferensi-konferensi, dan misi.

2.1.3. Jenis dan Macam Pariwisata

Ada berbagai jenis dan macam pariwisata diantaranya yaitu :

A. Menurut letak gografi : menurut Leonard J Lickorish dan carson l jenkish, bentuk pariwisata dibagi menjadi :

1. Pariwisata domestik, menyangkut warga dari suatu wilayah yang melakukan perjalanan hanya dalam wilayah itu sendiri dalam suatu negara itu sendiri.
2. Pariwisata in bound, yang menyangkut orang-orang yang melakukan perjalanan yang bukan warga wilayah tersebut dalam suatu negara sendiri.
3. Pariwisata out bound, menyangkut warga negara yang melakukan perjalanan dinegara lain.

Atau juga bisa dikategorikan sebagai:

1. Pariwisata internal, yang termasuk pariwisata domestik dan pariwisata in bound.
2. Pariwisata nasional, yang termasuk pariwisata domestik dan pariwisata out bound.

3. Pariwisata internasional, yang terdiri dari pariwisata out bound dan pariwisata out bound.

Menurut alasan atau tujuan perjalanan (Spillane,james.2001) yaitu:

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan; kegiatan wisata untuk tujuan mencari udara segar, suasana baru, untuk, untuk melihat sesuatu yang baru dan untuk ikut serta dalam keramaian pusat- pusat wisata.
2. Pariwisata untuk urusan dagang; yaitu jenis pariwisata yang pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar, pameran, simposium dan musyawarah kerja.
3. Pariwisata untuk rekreasi; yaitu jenis pariwisata yang orang-orang yang melakukan terdiri dari orang-orang yang sedang libur atau cuti untuk beristirahat untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohaninya.
4. Pariwisata untuk pendidikan; yaitu pariwisata yang dilakukan untuk tujuan studi atau mempelajari suatu ilmu pengetahuan.

B. Menurut obyek yang dikunjungi:

1. Pariwisata Budaya; pariwisata yang dilakukan karena ada daya tarik dan seni dan budaya suatu tempat atau daerah.
2. Pariwisata Kesehatan; yaitu perjalanan yang dilakukan untuk maksud mencari penyembuhan atau obat suatu penyakit seperti mandi air panas dan mandi lumpur.
3. Pariwisata Perdagangan; yaitu pariwisata yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan nasional atau internasional.
4. Pariwisata Olah Raga; yaitu suatu kegiatan untuk melihat atau menyaksikan suatu penyelenggaraan pesta olah raga di suatu negara tertentu.

2.1.4. Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Daerah

Dalam ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 1999 (tentang pemerintah daerah, pasal 79) telah ditetapkan mengenai sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah; Pajak adalah sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Selain satu dari jenis pajak, pajak daerah merupakan pungutan daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan untuk pembiayaan pengeluaran- pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.
 - b. Hasil Retribusi Daerah; Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dan ia tidak dikenakan iuran itu (Nurlaila,2004).

Sedangkan masalah tarif retribusi ini harus seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk dapat memelihara kelangsungan jasa itu. Dengan demikian, berarti bukan selalu mencari keuntungan saja, sehingga seperti halnya pajak, maka retribusi pun berlakunya diperlukan pengesahan terlebih dahulu dari penguasa atau menurut cara-cara yang ditetapkan undang-undang.

- c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Sumber Pendapatan Asli Daerah selanjutnya adalah BUMD. Dalam hal ini, laba BUMD yang diharapkan sebagai sumber pendapatan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelolaan BUMD harus bersifat dan harus berpegang pada prinsip- prinsip ekonomi secara umum. Sesuai dengan tujuan BUMD,

yaitu untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentuan serta ketenagakerjaan dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

2. Dana permbangan; Diperoleh dari bagian daerah, penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam serta dana alokasi umum dan dana alokasi umum.
3. Pinjaman Daerah; Pinjaman pemerintah daerah merupakan pinjaman dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, hingga saat ini pemerintah daerah belum diijinkan mengajukan pinjaman kepada pihak asing. Pinjaman pemerintah daerah biasanya dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran belanja daerah tetapi dilakukan oleh atau bekerja sama dengan pemerintah pusat.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah seperti telah diuraikan di atas diupayakan agar selalu mengalami peningkatan, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pendapatan sektor pariwisata di wilayah yang bersangkutan. Hasil penelitian Roerkgets dan Savat pada tahun 1983 (Soeratno, 2008) mengemukakan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah:
 - a. Menambah pemasukan dan pendapatan baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Peningkatan ini bisa dilihat dari meningkatnya hasil usaha yang dilakukan, misalnya bidang perhotelan, restoran, biro perjalanan, pramu wisata dan barang-barang souvenir. Sedangkan bagi pendapatan asli daerah serta sumber pertumbuhan ekonomi secara umum.
 - b. Membuka kesempatan kerja bagi penduduk di lokasi pariwisata, baik di sektor formal maupun informal.
 - c. Menambah devisa bagi negara.

2.1.5. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata

Melaksanakan tugas pembangunan yang sangat penting dan mulia ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan bukan tugas pemerintah semata, akan tetapi meskipun demikian, harus diakui bahwa pemerintah memainkan peran dominan dalam proses pembangunan nasional. Peran pemerintah yang dimaksud ini adalah selaku sabilisator, selaku inovator, selaku modernisator, selaku pelopor. Dan pelaksanaan sendiri kegiatan pembangunan tertentu (Nurlaila, 2004).

1) Peran Stabilisator

Salah satu ciri negara-negara terbelakang dan sedang membangun adalahnya labilnya situasi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam kondisi kehidupan kenegaraan dan masyarakat yang tidak stabil, sukar mengharakan terselenggaranya berbagai kegiatan pembangunan, sehingga peran yang sangat penting dimainkan oleh pemerintah secara efektif ialah peran selaku stabilisator.

2) Peran selaku Inovator

Inovator merupakan salah satu produk dari kreatifitas. Inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru dan yang terpenting cara berpikir baru. Dengan demikian, dalam peranan selaku inovator, pemerintah sebagian keseluruhan harus menjadikan sumber dari hal-hal baru.

Ada 3 hal yang mutlak yang dilakukan oleh pemerintah selaku inovator :

1. Menerapkan inovasi dilingkungan birokrasi pemerintah. Masyarakat menganggap aparatur pemerintah pada umumnya cara kerjanya lamban, sistem kerja yang berbelit-belit, cara berpikir yang berorientasi kekuasaan. Dan hasilnya tingkat produktifitas kekuasaan. Dan hasilnya tingkat produktivitas kerja yang rendah.
2. Inovasi yang sifatnya konsepsional. Pemerintah dengan seluruh jajarannya harus merupakan sumber dari ide-ide baru.
3. Inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

3) Peran selaku Modernisator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara modern. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain adalah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaannya dan kedaulatannya dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain. Sederajat dalam arti perolehan pengakuan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain:

1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Kemampuan dan kemahiran manajerial.
3. Kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi.
4. Sistem pendidikan yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif.
5. Landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis.
6. Memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan.
7. Rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional.
8. Kesediaan mengambil resiko.
9. Orientasi masa depan.
10. Bersedia menerima perubahan.

4) Peran selaku Pelopor

Selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat, misalnya ; kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi yang maksimal, kepeloporan dalam kejujuran, kepeloporan dalam penegakan disiplin, kepeloporan didalam ketaatan perundang-undangan. Pada sektor pariwisata pemerintah memberikan kebijakan pada jangka waktu liburan nasional sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk berwisata, mengeluarkan Undang-undang kepariwisataan dan mendukung peningkatan masyarakat dalam menggali dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya daerah, dan peningkatan promosi dan pemasaran baik didalam maupun diluar negri dengan memanfaatkan kerja sama kepariwisataan regional secara optimal dalam bentuk paket-paket wisata.

5) Peran selaku Pelaksanaan Sendiri

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata-mata karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal

yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah. Namun sebagai industry perdagangan jasa kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab empat hal utama yaitu: perencanaan (*planning*) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (*development*) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (*policy*) pariwisata, dan pembuatan serta penegakan peraturan (*regulation*). Menurut Iengah Subadra mengenai peran-peran pemerintahan dalam bidang pariwisata tersebut diatas.

i. Perencanaan Pariwisata

Pariwisata merupakan industry yang memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif dan minimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata, diperlukan perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan diantara para Stakeholders. Masing-masing daerah tujuan wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula.

ii. Pembangunan Pariwisata

Pembangunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembangunan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah, selain itu pemerintah juga berperan sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata.

iii. Kebijakan pariwisata

Kebijakan merupakan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dimuat dalam persyaratan-persyaratan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan hubungan politik terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisatawan manca negara. Umumnya kebijakan pariwisata dimasukkan dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan dengan pembangunan pariwisata adalah kebijakan mengenai ketenagakerjaan, penanaman modal dan keuangan, industri-industri penting yang mendukung kegiatan pariwisata dan perdagangan barang dan jasa.

iv. Peraturan Pariwisata

Peraturan pariwisata memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya pengalaman perjalanannya.

2.1.6. Keterkaitan Industri Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan pariwisata dianggap penting oleh pemerintah, mengingat Indonesia sebagai negara berkembang sehingga praktis sektor industri pariwisata belum begitu menonjol. Untuk itu sumber pertumbuhan nasional yang dimiliki mungkin bias dianggap dominan adalah kepariwisataan. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, telah menetapkan tujuan-tujuan dalam sektor pariwisata sebagai berikut:

- a. Menjadikan kepariwisataan sebagai sektor andalan guna menggerakkan kegiatan ekonomi.
- b. Memperbesar penerimaan devisa.
- c. Memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan memperluas lowongan pekerjaan terutama bagi masyarakat setempat.
- d. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sudut pembangunan negara, pariwisata merupakan bagian yang integral dan pembangunan nasional. Pariwisata mempunyai manfaat dan peranan sebagai berikut :

- a. Peranan pariwisata dalam bidang ideologi sebagai wahana efektif untuk menanamkan jiwa semangat dan nilai-nilai luhur kebudayaan nasional.
- b. Manfaat wisata dalam bidang politik, dengan dibangunnya obyek wisata yang tersebar diseluruh nusantara dan penyebaran kegiatan pariwisata ke berbagai daerah menambah kecintaan dan rasa bangga terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, manfaat pariwisata dalam bidang ekonomi, akan meningkatkan penerimaan devisa negara dan penerimaan negara yang berupa pajak langsung.
- c. Manfaat pariwisata dalam bidang social dan budaya. Turut berupaya dalam peningkatan obyek-obyek wisata, pertumbuhan perkumpulan seni dan budaya, pertumbuhan hasil kerajinan dan pelestarian peninggalan sejarah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder, Sinfarimbun, (2000) mengungkapkan bahwa metode penelitian data sekunder ini, diperoleh dari lembaga, instansi atau lembaga-lembaga resmi yang terlebih dahulu telah mengumpulkan dan memproses data.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber, dengan cara mengambil data-data statistik yang telah ada serta dokumen-dokumen lain yang terkait yang diperlukan. Data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data ini dikumpulkan dari dinas pariwisata dan kebudayaan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan instansi-instansi yang terkait.

3.3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan tujuan penelitian:

1. Untuk menganalisis problematika sektor pariwisata di Provinsi Jambi tahun 2011-2020 menggunakan analisis deskriptif berdasarkan fenomena sektor pariwisata khususnya Provinsi Jambi
2. Untuk menganalisis perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Jambi tahun 2011-2020 menggunakan formulasi pertumbuhan yaitu $Y = \frac{Y_{t-1} - Y_{t-0}}{Y_{t-1}} \times 100\%$.
3. Untuk menganalisis pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2011-2020 menggunakan formulasi yaitu $y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + e$

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmar, Nurlinda, & Muhani, M. (2012). Peranan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Jurnal Equilibrium*
- Anggraeni, N. D. (2016). Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kota Yogyakarta. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Anggraini, F. S. (2004). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di DKI Jakarta. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Anwar, I. N. (2016). Pengaruh Sektor Unggulan Pertanian Dan Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pandeglang. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Astuti, R. i. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2004 - 2012. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Austriana, I. (2005). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Basuki, A. T. (2014). *Electronic Data Processing (SPSS 15 dan EvIEWS 7)*. Yogyakarta: Danis Media.
- Boediono. (1985). Ekonomi Moneter. In Boediono, *Ekonomi Moneter (Edisi 3)* (pp. 161-164). Yogyakarta: BPFE.
- Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasana, N. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2014.
- Ibnurrasyad, Z. (2016). Analisa Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Islam Negeri.
- Indrasari, V. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
- Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Malau, B. C. (2012, maret). PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Retrieved from [andre239: wordpress.com](http://andre239.wordpress.com)
- Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 1- 8.